

## Daftar Pustaka

### Buku-buku

- Kusmaatmadja Mochtar, Konsep-Konsep Pembangunan Hukum dan Alumni, Bandung, 2013
- Sugianto, Umar Said Pengantar hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Djamin, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Rajagrafindo Persada, 2012
- Mahmud Marzuki, Peter, Pengantar Ilmu Hukum, Prenamedia Group, 2008
- Kansil, C.S.T., Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2010,
- Muhammad Bakri, Pengantar Hukum Indonesia, Tim UB Press, Malang, 2011
- John Cannon, The Oxford Companion to British History (dalam bahasa Inggris), Oxford University Press, 2009
- Social Policy in the Third Reich: The Working Class and the "National Community", Berg Publishers, Oxford, 1993.
- Angga, Prastyo, Kebebasan "Berserikat Dan Mengeluarkan Pendapat Dalam Kerangka Demokrasi Konstitusional", bahasan.id., 2021.
- Vanya, Karunia Mulia Putri, "Isi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000", Kompas.com, 2021.
- Rizki Kurniawan dkk, Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Universitas Gresik, 2022
- Sukiyat dkk, Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Universitas Gresik, Jakad Media Publishing, 2019
- Windayana, I Made, Asas-asas Hukum Pidana Buku Paduan Mahasiswa, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- Wachidiyah Nigsih, Dwi, Hukum Pidana, LP21 Press Suarabaya, 2015
- Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Abidin Farid, Zainal, Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta, 2008
- Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesai Dalam Perspektif pembaharuan, UMM Press, 2008
- Pawennei Mulyati, Hukum Pidana, Mitra Wacana Mandiri, Jakarta, 2015
- Koswadji, Perkembangan Macam-macam Pidanaa dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 1995

Wahyuni, Fitri, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017

Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenanda Media, Jakarta, 2015

Alim, Muhammad, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945, UII Press, Yogyakarta, 2011

### **PeraturanPerundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan definisi Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas di sebut dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Organisasi Masyarakat;

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Ormas sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Bab VII tentang Pembekuan dan Pembubaran Organisasi Masyarakat;

Ketentuan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perusakan atau Ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Tahun 2023 tentang perusakan dan penghancuran barang, sebagaimana pelaku perusakan yang melakukannya;

Ketentuan Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kekerasan terhadap orang atau barang;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II tentang Kejahatan dan Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum;

Ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengrusakan fasilitas umum; dan

Ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Tahun 2023 tentang perusakan dan penghancuran barang.

Pasal 20 Ayat (1) dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”

### **Karya Ilmiah**

Ida Ayu Sri Intan Dwiyantri et al., Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap, Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, 2021

Nur Hidayat, Organisasi Masyarakat dan Ketertiban Umum (Studi tentang Keterlibatan Pemuda Pancasila dalam Bentrokan Massa di DKI Jakarta, Jawa barat dan Banten Tahun 2013-2018), Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2019

Andhi Setya Budi, Subarkah dan Suparnyo, Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia, jurnal Suara Keadilan, Vol 19, No.1 (2018). Diakses melalui <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/issue/view/121>, 2019

Tyas Arum Samodro, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020

## **Media Daring**

KBBI Daring, (Online), <https://kbbi.web.id/pengrusakan>

Hukum Online, Tujuan, fungsi, Pendirian, dan Keanggotaan dalam Ormas, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-fungsi-pendirian-keanggotaan-ormas-lt623d20dc2cbaa/>, Jurnal, Maret, 2022.

Tantangan dan Permasalahan Implementasi UU Ormas di Indonesia, <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-ORMAS-Antara-Peran-Pemerintah-dan-Partisipasi-Masyarakat-1494217306.pdf>, 2023.

[www.mahkamah.konstitusi.go.id](http://www.mahkamah.konstitusi.go.id), DPR: UU Ormas Memberikan Perlindungan Hukum yang Adil, 6 Maret 2018, <http://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14335>, 2019.

[Banjarbarukota.go.id](http://Banjarbarukota.go.id), Siap-siap Pengrusakan Fasilitas Umum, <https://mediacenter.banjarbarukota.go.id>, Jurnal, 2013.

Hukum Online, Jerat Hukum Ormas yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-ormas-yang-mengganggu-ketentraman-dan-ketertiban-umum-lt5b0139ce17fcb/>, 2018.